

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kekalahan ISIS (*Islamic State of Iraq and Suriah*) pada bulan Juni 2019 meninggalkan polemik yang cukup besar bagi berbagai negara. Salah satunya adalah nasib bagi ribuan simpatisan ISIS yang tidak jelas nasibnya yang berada di kamp pengungsian Suriah. Informasi kekalahan ISIS atas SDF (Pasukan Demokratik Suriah) menjadi pemberitaan media yang masif dan terus bergulir terkait dengan pembaruan kondisi terkini diwilayah setempat yang dilakukan oleh media nasional maupun internasional. Tercatat lebih dari 9.000 anggota keluarga pejuang ISIS dilaporkan berada di kamps penampungan Al-Hol, timur laut Suriah termasuk warga negara Indonesia yang bergabung dengan ISIS. (dikutip <https://www.kompas.com/tren/read/2019/10/10/192118365/soal-penusukan-wiranto-ini-rentetan-jejak-isis-di-indonesia?page=all>, diakses pada 19 November 2019).

Bersamaan dengan kekalahan ISIS atas SDF, muncul isu yang beredar di masyarakat untuk memulangkan atau menerima kembali eks ISIS ke Indonesia sejak juni 2019, berkat laporan resmi sejumlah media nasional yang menayangkan eks ISIS yang menginginkan pulang ke Indonesia. Namun isu tersebut meredup seiring dengan munculnya berbagai isu nasional yang menyangkut tentang pemilihan kabinet baru pasca pemilihan presiden atau pilpres 2019.

Awal mula munculnya kembali isu pemulangan eks ISIS ke Indonesia berasal dari pernyataan Menteri Agama Fachrul Razi. Beberapa media, bahkan situs resmi

kementrian Agama mengutip Fachrul, bahwa pemerintah sedang mengkaji opsi kepulangan eks ISIS. Sementara, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfudz MD menyebut pemerintah telah memulai untuk mengkaji opsi tersebut. Menurutnya ada sekitar 660 orang WNI eks ISIS yang tersebar di beberapa negara dan menjadi teroris lintas batas atau FTF (*Foreign Terrorist Fighter*), sehingga akan sulit untuk mengidentifikasi mana yang layak untuk dipulangkan dan mana yang tidak.

Sedangkan Presiden Indonesia Joko Widodo memberi sinyal enggan untuk memulangkan eks ISIS yang dibuktikan melalui pernyataannya yang tidak menyetujui eks ISIS untuk dipulangkan. Namun, keputusan resmi terkait dengan pemulangan eks ISIS ke Indonesia akan tetap dibahas dalam rapat terbatas (ratas) dengan kementrian terkait. Jokowi mengatakan, pemerintah masih mengkalkulasi dampak baik dan buruk akibat pemulangan eks ISIS tersebut.

Muncunya sejumlah informasi terkait dengan pemulangan eks ISIS ke Indonesia menjadi sebuah isu yang kontroversial di masyarakat, pemerintah mendapatkan dua tekanan yang berbeda yaitu untuk tidak memulangkan dan harus memulangkan. Hal ini terjadi karena adanya polarisasi pemahaman yang terbentuk di masyarakat. Sebagian besar masyarakat Indonesia menolak untuk memulangkan eks ISIS. Mereka meyakini bahwa para eks ISIS akan menjadi ancaman yang berbahaya jika pemerintah menerima kembali mereka sebagai Warga Negara Indonesia (WNI). Pasalnya kelompok ISIS menjadi salah satu kelompok yang kerap melakukan tindakan teror yang mengatasnamakan agama, sehingga kelompok

tersebut dianggap mengganggu keberlangsungan kerukunan umat beragama di Indonesia.

Kekhawatiran masyarakat terkait dengan penolakan tersebut memiliki dasar yang cukup kuat. Pada 1980-an, Indonesia pernah memulangkan eks kombatan mujahidin Afghanistan yang kemudian berubah menjadi teroris Bom Bali. Hal ini dipicu karena pemerintah belum memiliki program deradikalisasi yang serius. Penyerangan teror mengatasnamakan agama menjadi indikator yang paling banyak memakan korban di Indonesia, seperti yang dilansir dalam laporan khusus oleh Beritagar.id.

Gambar 1.1



Sumber : Beritagar.id Tahun 2018

Sementara itu, sebagian masyarakat yang lain menyatakan, mereka menyetujui untuk menerima eks ISIS kembali, sebagai bentuk memberi dukungan kemanusiaan. Mereka menganggap bahwa eks ISIS berhak kembali pulang ke

Indonesia karena masih memiliki ikatan darah dengan warga Indonesia. Namun, mereka tidak hanya asal menerima saja, tetap harus ada jalur hukum atau kebijakan khusus dari pemerintah untuk menerima mereka kembali, seperti program deradikalisasi oleh pemerintah.

Dukungan masyarakat untuk menerima eks ISIS kembali, didasari dengan kondisi mereka yang akan mengalami *'stateless'* atau tidak memiliki identitas negara. Selain alasan tersebut, dukungan untuk memulangkan eks ISIS dikarenakan masyarakat khawatir akan timbulnya krisis kemanusiaan di Suriah. Bahkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menyerukan agar negara-negara asal pejuang ISIS memulangkan penduduk mereka.

Perdebatan publik mengenai pemulangan eks ISIS yang beredar di masyarakat tak luput dari peran media dalam membingkai pemberitaan tentang mereka. Pemberitaan media seolah membentuk sebuah polarisasi yang terjebak dalam cara pandang hitam-putih dan berpusar pada perdebatan untuk menolak atau memulangkan mereka kembali. Media kerap membingkai perdebatan tersebut dengan menyangkutpautkan UU Kewarganegaraan yang sering menjadi rujukan media dalam membahas isu tersebut.

Dominannya pembingkaiian kewarganegaraan ditunjukkan dari banyaknya pemberitaan terkait dengan status kewarganegaraan eks ISIS yang hilang karena membakar paspor. Pendapat pakar dan pejabat publik memenuhi isi pemberitaan seperti pada salah satu artikel harian Kompas yang ditulis oleh Romli Atmasasmita, Guru Besar Emeritus Hukum Pidana Internasional, dengan judul *'Status WNI Eks*

NIIS' yang terbit pada 3 Juli 2019. Artikel tersebut menyebutkan bahwa WNI yang bergabung dengan ISIS telah melanggar UU No. 12 Thn 2006 tentang Kewarganegaraan, statusnya hilang sebagai warga negara karena ditenggarai dengan bergabungnya WNI secara sukarela masuk kedalam dinas sebagai tentara asing tanpa seizin Presiden dan secara otomatis eks ISIS menyandang *stateless*.

UU Kewarganegaraan inilah yang menjadi salah satu indikator masyarakat enggan atau bahkan menolak untuk memulangkan eks ISIS selain dari sisi keamanan, hal ini dikarenakan eks ISIS sudah bukan bagian dari warga negara Indonesia, karena status kewarganegaraannya telah hilang seiring dengan pelanggaran yang dilakukannya yaitu bergabung tentara asing dan membakar paspor.

Namun, berdasarkan hukum internasional, mencabut kewarganegaraan seseorang adalah ilegal jika menjadikannya *stateless*. Apalagi jika keputusan pencabutan tidak melalui peradilan yang adil. Kewarganegaraan merupakan hak fundamental seseorang yang tertera dalam pasal 15 ayat 1 (1) Deklarasi Universal HAM menyatakan bahwa, setiap orang memiliki hak kewarganegaraan. Dan negara menurut OHCHR (*Office of the United Nation High Commisioner for Human Right*) harus memenuhi kewajiban hak asasi seseorang berkenaan dengan permintaan maupun kehilangan kewarganegaraan. Apabila seseorang dirampas atau tidak diakui kewarganegaraannya, maka mereka tidak akan memiliki proteksi legal dan kehilangan hak asasinya. Sehingga media tidak seharusnya mereduksi isu tersebut dengan membingkai kehilangan kewarganegaraan karena membakar paspor.

Ditengah keramaian yang menjadi pro-kontra terkait dengan pemulangan eks ISIS, pada akhirnya pemerintah Indonesia telah memberikan keputusan resmi melalui rapat terbatas (ratas) di Istana Bogor pada 11 Februari 2020 untuk tidak memulangkan atau menolak eks ISIS kembali ke Indonesia. Hal ini didasari dengan pernyataan Menkopolkum Mahfudz MD bahwa pemerintah dan negara harus memberi rasa aman dari ancaman terorisme dan virus-virus baru teroris terhadap 267 juta rakyat indonesia, sehingga memulangkan eks ISIS akan menimbulkan ancaman bagi warga negara.

Meski pemerintah telah memberikn *statement* resminya dengan tidak memulangkan eks simpatisan ISIS. Namun, berbagai ahli masih memperdebatkan tentang kebijakan tersebut. Kabar informasi tentang penolakan pemulangan eks ISIS lantas banyak menghiasi *headline* berbagai media, sehingga dipercaya dapat memberikan pemahaman yang cukup krusial kepada publik.

Kemampuan media untuk meliput secara kritis, komprehensif dan berimbang dalam kasus bernuansa konflik diyakini akan berperan besar untuk membawa publik kesebuah pengertian yang benar terhadap upaya penyelesaian konflik, karena media menempatkan masalah tesebut dalam konteks yang tepat. Namun, jika media hanya menyajikan konflik demi konflik dengan mengabaikan konteks yang lebih mendasar tanpa mendorong upaya untuk mencari solusi maka kemungkinan besar yang muncul adalah kebencian, stigmatisasi dan diskriminasi.

Dalam pemingkaian pemulangan eks ISIS ke Indonesia, setiap surat kabar menyajikan berita sesuai dengan versinya masing-masing. Berita yang disajikan

bukanlah realitas yang sesungguhnya, karena berita tersebut melalui proses seleksi. Apa yang dimunculkan media melalui berita akan memperlihatkan penekanan terhadap satu aspek tertentu, dan juga menyamarkan suatu hal yang tidak dikehendaki oleh media. Pemberitaan sentimen nasionalistik yang diperlihatkan oleh beberapa media hanya menonjolkan mengenai aspek legal-formal. Padahal, selain aspek tersebut, terdapat aspek kemanusiaan yang harus diperhatikan media secara serius agar dipenuhi oleh negara. Seperti, bagaimana membicarakan tentang kondisi dan masa depan anak-anak yang dibawa orangtuanya atau yang telah lahir disana, atau mereka yang merasa dimanipulasi setelah menyaksikan apa yang terjadi tidak sesuai dengan yang dijanjikan oleh ISIS.

Melihat kasus diatas, media memiliki dampak yang sangat penting karena dapat menghadirkan berbagai macam kepentingan didalam masyarakat, bukan saja melalui isi yang tertulis saja tetapi juga telah dikemas dalam bentuk informasi yang penuh dengan makna simbolik. Dalam pembersihan pemulangan eks ISIS ke Indonesia, terdapat dua faktor yang sering disinggung dan dijadikan sebagai alasan yang kuat dari berbagai perspektif.

Pertama, sentimen nasionalisme yang diartikulasikan secara sederhana dengan menggambarkan pembakaran paspor sebagai alasan kuat untuk menolak identitas mereka. Kedua, penekanan berlebihan pada isu keamanan. Dengan menyajikan isu keamanan dengan kesan yang gawat darurat seolah menjadi pembenaran untuk boleh melangkah proses rasional demokratis dan pertimbangan kemanusiaan. Dengan begitu, pemberitaan yang membingkai dan mengidentifikasi faktor-faktor konflik berpotensi mempertajam kesalahan persepsi di tengah masyarakat atas

sebuah situasi yang dapat memperkuat konservatisme nasionalisme karena mereka yang menjadi merasa berhak untuk menentukan siapa yang nasionalisme dan siapa yang tidak, siapa yang patut dilindungi dan siapa yang tidak.

1.2 Rumusan Masalah

Pembingkain berita yang telah terbentuk, akan memberikan dampak pada tanggung jawan media kepada masyarakat dalam memberikan informasi. pumbingkaian tersebut juga akan memperlihatkan etika jurnalisme yang digunakan oleh media dalam memberitakan suatu peristiwa. Untuk mengetahui pumbingkaian media tentang pemulangan eks ISIS ke Indonesia akan diteliti dua media cetak yaitu surat kabar *Harian Kompas* dan *Koran Tempo*. Kedua surat kabar nasional tersebut dikenal media sekuler, nasionalis dan tidak condong ke satu ideologi.

Berdasarkan latar belakang dan asumsi diatas maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut : Bagaimana media massa di Indonesia mumbingkai isu pemulangan eks ISIS ke Indonesia ?

1. Bagaimana *Koran Kompas* dan *Koran Tempo* mumbingkai isu pemulangan eks ISIS ke Indonesia?
2. Bagaimana perbandingan pumbingkaian *Koran Kompas* dan *Koran Tempo* dalam isu Pemulangan eks ISIS ke Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan pumbingkaian pemberitaan mengenai pemulangan eks ISIS ke Indonesia di surat kabar *Koran Tempo* dan *Harian Kompas*. Penelitian ini memiliki tujuan mengidentifikasi strategi narasi

yang digunakan kedua media dalam membingkai isu pemulangan eks ISIS ke Indonesia.

1. Untuk mengidentifikasi bagaimana *framing* pemberitaan mengenai pemulangan eks ISIS ke Indonesia.
2. Untuk membuktikan bagaimana perbandingan *framing* pemberitaan mengenai pemulangan eks ISIS ke Indonesia.

1.4 Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam bidang :

1. Akademis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan referensi dalam pengembangan riset komunikasi, terutama mengenai studi komunikasi yang memiliki hubungan dengan disiplin ilmu lain terkait studi keamanan yang menggunakan media sebagai penyampai informasi dan mampu menggiring opini publik yang dapat mempengaruhi untuk mendukung atau menerima kebijakan pemerintah.

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai pembedaan suatu fenomena atau peristiwa yang dilakukan oleh media massa, sehingga masyarakat mampu menerima informasi yang dipahami tidak secara satu sisi saja. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan saran dan kritik bagi jurnalis dan pengelola media massa untuk senantiasa menghasilkan peliputan yang seimbang agar tidak menimbulkan polarisasi di tengah kekhawatiran publik dalam menanti keputusan pemerintah.

3. Sosial

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan kepada masyarakat untuk dapat menyikapi pemberitaan media secara lebih objektif serta proporsional dan mampu menyikapi pemberitaan media massa yang tidak berimbang, sehingga masyarakat diharap untuk selalu berhati-hati dalam mencerna informasi yang tersebar di media.

1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1 *State of the Art*

Penelitian terdahulu telah menunjukkan bahwa analisis framing digunakan untuk menjelaskan konstruksi realitas yang diangkat oleh media massa. Pertama, Tesis “Analisis Framing Studi Kasus Kompas dan Media Indonesia Dalam Liputan Kerusuhan di Temanggung 8 Februari 2011” oleh Kristanto Hartadi Universitas Indonesia 2011. Penelitian ini menelaah tentang bagaimana dua surat kabar nasional Kompas dan Media Indonesia membuat framing tentang liputan atas kasus kerusuhan di Kota Temanggung, pada 8 Februari 2011. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif menggunakan analisis metode framing dan wawancara media, yang mendesak Pemerintah agar melindungi warga negara khususnya kaum minoritas dari kekerasan atas nama agama, namun pada prosesnya praktik framing tidak tuntas.

Hasil analisis framing kemudian dijadikan sebagai bahan untuk wawancara dengan pemimpin redaksi kedua media tersebut untuk memberikan keterangan tentang pengetahuan media mengenai framing media. Hasil penelitian ini menyarankan agar kedua media tersebut memahami kiat-kiat framing yang efektif

dan mendidik para wartawannya untuk memahami konteks dan mengembangkan pola pemberitaan interpretif dalam upaya memelihara pluralitas agama di Indonesia.

Kedua, Tesis “*Peace Journalism and Framing in the Northern Rakhine State of Myanmar*” oleh Zin Mar Myint, *Kansas State University* 2017. Penelitian ini melihat bagaimana pengaruh media menjadi arus yang sangat kuat bagi pembentukan perdamaian di negara Myanmar selama masa konflik yang berkepanjangan terutama pada reformasi politik 2010. Penelitian menunjukkan bahwa peran media dalam perdamaian di Myanmar cukup berhasil, karena media lebih menggunakan pendekatan pada konsep *peace journalism*. Penelitian ini menggunakan metode analisis framing dalam mengulas pemberitaan konflik Myanmar Utara dengan kelompok muslim dan budha. Penelitian ini menggunakan studi komparatif untuk menelaah antara *war journalism* dan *peace journalism* dengan empat media yaitu: dua media besar di Myanmar, satu dari Bangladesh dan satu dari Amerika Serikat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media asing banyak menampilkan *war journalism* pada kasus konflik di Myanmar, sedangkan media dalam negeri lebih menampilkan *peace journalism* dalam pemberitaan mediana.

Ketiga, Jurnal *Media coverage of refugees and asylum seekers in regional Australia: a critical discourse analysis*, oleh Samantha Cooper, Erin Olecnijka, Caroline Lanotte, Charlotte Smedley, Media Internasional Australia, *The University of New South Wales*, Australia 2019. Penelitian ini menganalisa artikel dari empat media lokal menggunakan analisis isi kuantitatif dan analisis konten secara kualitatif untuk melihat bahasa yang digunakan oleh media dalam memandang

pengungsi atau pencari suaka perlindungan. Metode penelitian menggunakan analisis wacana kritis dari Teun Van Dijk, yang melihat diskursus determinasi pada konteks sosial dan budaya. Objek penelitian merupakan artikel yang terbit pada kurun waktu 1 juli 2014 – 15 April 2015 dan menemukan 64 artikel termasuk 11 diantaranya merupakan tulisan editor.

Penelitian ini menemukan bahwa pemberitaan di media nasional, pengungsi dan pencari suaka digambarkan secara negatif sedangkan di media lokal mereka digambarkan lebih humanis dengan mengangkat cerita individu. Dari temuan ini kemudian menjadi titik untuk menganalisa bagaimana perbedaan ini terjadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa exposure negatif dari media nasional dipengaruhi oleh wacana nasional dan kebijakan pemerintah.

Keempat, Jurnal Sage 2018, *Framing terror A content analysis of media frames used in covering ISIS* Oleh Kris Boyle dan Jordan Mower. Penelitian ini menggunakan analisis framing dengan analisis isi untuk membandingkan berita dan teks media dari tiga media besar khususnya koran dari beberapa negara (Amerika Serikat, Inggris Raya dan Timur Tengah) tentang pemberitaan ISIS di media, yaitu : *The New York Times*, *Daily Mail* dan *Asharq Al-Awsat*. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa *The New York Times* dan *Asharq Al-Awsat* menampilkan ISIS dengan lebih netral sedangkan media Inggris Raya (*Daily Mail*) lebih konservatif terhadap framing negatif mengenai ISIS dibandingkan dengan media Amerika Serikat dan Timur Tengah.

Penelitian-penelitian sebelumnya telah banyak membuktikan berbagai wacana yang dikonstruksikan oleh media massa dalam menampilkan suatu

peristiwa, terutama peristiwa yang memicu konflik dan perdebatan terhadap kelompok tertentu. Penelitian tersebut dapat dibongkar dengan menggunakan metode analisis framing. Penelitian ini juga akan menggunakan metode yang sama untuk melihat konstruksi media mengenai isu pemulangan eks ISIS dengan objek penelitian pada dua surat kabar nasional *Kompas* dan *Koran Tempo* dengan menggunakan Analisis Framing Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. Fokus kajian penelitian komunikasi ini terletak pada, bagaimana media menampilkan dan mengkonstruksikan sebuah peristiwa yang disajikan kepada khalayak.

1.5.2 Paradigma Penelitian

Paradigma memiliki kedudukan yang penting dalam sebuah penelitian. Paradigma berfungsi sebagai pemandu yang memberikan seperangkat aturan bagi peneliti dalam menjalankan aktivitas penelitian. Secara sederhana, paradigma dapat diartikan sebagai kacamata atau cara pandang untuk memahami realitas atau dunia nyata. Guba dan Lincoln mendefinisikan paradigma sebagai serangkaian keyakinan-keyakinan dasar (*basic beliefs*) atau metafisika yang berhubungan dengan prinsip-prinsip utama atau prinsip-prinsip pokok (Sunarto, 2011). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa paradigma merupakan serangkaian keyakinan dasar atau sudut pandang berfikir yang membimbing tindakan peneliti, tidak hanya dalam memilih metode tetapi juga cara-cara fundamental yang bersifat ontologis dan epistemologis dalam sebuah penelitian.

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivis. Guba dan Linclon (dalam patton 2002) berpendapat, konstruksivisme dimulai dengan premis bahwa dunia manusia berbeda dari alam, dunia fisik karenanya harus dipelajari secara

berbeda. Tekait dengan hal tersebut paradigma konstruktivis percaya bahwa realitas sosial tidak muncul dalam bentuknya yang asli begitu saja, melainkan harus diseleksi melalui cara orang memandang dari setiap hal (Littlejohn 2017). Paradigma konstruksi menganggap pembuat teks berita sebagai penentu yang akan mengarahkan ke pola pikir khalayak. Pertanyaan utama dari paradigma konstruksionis adalah bagaimana peristiwa atau realitas dikonstruksi, dan dengan cara apa konstruksi itu dibentuk (Eriyanto 2011).

Konsep mengenai konstruksivisme diperkenalkan oleh Peter L. Bieger. Menurutnya, realitas tidak dibentuk secara alamiah tetapi realitas dibentuk dan dikonstruksi. Melalui pemahaman ini, realitas menjadi berwajah ganda/plural. Setiap orang bisa memiliki konstruksi yang berbeda-beda atas suatu realita (Eriyanto 2011). Setiap orang yang memiliki pengalaman, preferensi, pendidikan tertentu, dan lingkungan pergaulan atau sosial tertentu akan menafsirkan realitas sosial itu dengan konstruksinya masing-masing.

Paradigma konstruksionis dipilih karena berangkat dari cara peneliti melihat realitas yang dikonstruksi oleh media, dengan mengasumsikan bahwa selalu ada kepentingan media pada sebuah struktur sosial. oleh karenanya, peneliti beranggapan bahwa paradigma konstruktivis adalah paradigma yang paling tepat digunakan dalam penelitian ini dengan alasan karakteristik penting dari paradigma ini adalah menekankan pada pemahaman dan pemaknaan.

Dalam penelitian ini, peneliti melihat adanya pembingkaihan pemulangan eks ISIS yang memiliki perbedaan yang cukup dalam dari beberapa media, bahkan

media cenderung mempolarisasi untuk memberikan pemahaman kepada publik mengenai persetujuan untuk memulangkan atau menolak mereka kembali ke Indonesia. Sehingga paradigma konstruktivisme digunakan untuk membongkar bagaimana media khususnya Kompas dan Koran Tempo membingkai pemulangan eks ISIS.

1.5.3 Teori Tanggung Jawab Sosial Pers

Teori tanggung jawab sosial dikembangkan di Amerika Serikat di abad ke-20. Teori tanggung jawab sosial merupakan salah satu dari empat teori pers. Empat teori pers merupakan salah satu pengelompokan sistem pers yang terkenal di dunia yang disajikan dalam buku *Four Theories of Pers* (Siebert, Peterson, and Schram 1963). Pers dikelompokkan menjadi empat kategori yaitu: otoriter, liberal, tanggung jawab sosial dan totaliter-soviet.

Penelitian ini merujuk kepada teori tanggung jawab sosial. Teori tanggung jawab sosial dikembangkan di Amerika Serikat di abad ke-20. Teori tanggung jawab sosial merupakan evolusi gagasan praktisi media, undang-undang media, dan hasil kerja Komisi Kebebasan Pers (Komisi Hutchin) yang berpendapat bahwa selain bertujuan untuk memberi informasi, menghibur, mencari untung, juga bertujuan untuk membawa konflik ke dalam arena diskusi (Siebert, Peterson, and Schram 1963).

Teori Tanggung Jawab Sosial mempunyai dasar pemikiran bahwa kebebasan pers harus disertai tanggung jawab kepada masyarakat. Teori ini memandang kebebasan pers perlu dibatasi atas dasar moral dan etika, pers harus bertindak dan

melakukan tugas sesuai dengan standar hukum tertentu. Teori ini juga memberikan banyak informasi dan menghimpun segala gagasan atau wacana dari segala gagasan atau wacana yang tidak hanya mewakili kelompok mayoritas, tetapi juga memberikan jaminan atas hak-hak golongan minoritas ataupun oposisi untuk turut bersuara.

Berdasarkan definisi tersebut, pers harus dapat memberikan tanggung jawab sosialnya kepada masyarakat untuk mencapai perkembangan diskusi yang positif bagi masyarakat. Sehingga media atau pers hendaknya memiliki sifat yang pluralis dan mencerminkan kebhinekaan masyarakat dengan memberikan kesempatan yang sama untuk mengemukakan berbagai sudut pandang dan hak untuk menjawab.

Teori tanggung jawab sosial pers digunakan dalam penelitian ini untuk menjelaskan tentang peran dan tanggung jawab yang dilakukan oleh media massa khususnya *Harian Kompas* dan *Koran Tempo* untuk memberikan informasi tentang fenomena eks ISIS dan juga kajian-kajian serta wacana yang didukung oleh para tokoh, pakar dan praktisi yang ditampilkan oleh media. Penggunaan teori juga dapat memberikan dukungan teoritis untuk melakukan analisis *framing* pada penelitian ini untuk melihat pembingkaiian yang dilakukan oleh kedua media tersebut dalam isu pemulangan eks ISIS ke Indonesia.

1.5.4 Etika Jurnalisme

Praktik etika pada umumnya, dan dalam jurnalisme pada khususnya, bertumpu pada nilai-nilai kemanusiaan. Landasan universal tersebut yang menjembatani benua, ras dan bahasa mencegah pembahasan etika hanya menjadi masalah pribadi

yang terpisah-pisah. Dr. Rushworth Kidder (Institute Center of Journalist 2006) dari Institut Etika Global mengatakan dalam konferensi etika ICFJ di Amerika Latin, bahwa etika jurnalisisme tidak bisa dibandingkan dengan etika kedokteran atau hukum. Namun, wartawan harus meliput melalui lensa etika tentang apa yang terjadi dalam masyarakat, wartawan harus menggunakan bahasa etika selain bahasa sehari-hari dalam politik dan ekonomi. Wartawan juga harus bertanya: “*apakah ini berguna?*” atau “*apakah secara ekonomi ini layak?*” tetapi “*apakah ini benar?*” (Institute Center of Journalist 2006).

Pengambilan keputusan etis bukan saja merupakan penerapan atas nilai-nilai universal untuk menjawab pertanyaan tentang salah atau benar: tapi juga tentang suara-suara menentang yang harus dihadapi jika dua jenis nilai atau lebih saling bertentangan, sehingga wartawan harus memutuskan mana yang harus dipilih. Diantara nilai yang paling sering bertentangan dalam pandangan Kidder adalah :

- Kebenaran versus Loyalitas
- Individu versus Masyarakat
- Jangka Pendek versus Jangka Panjang
- Keadilan versus Pengampunan

Konflik-konflik tersebut merupakan pertanyaan tentang etika yang khas dihadapi wartawan dalam melakukan profesinya. Sehingga Kidder menyebutnya sebagai “*dilema kebenaran versus kebenaran*”.

Terdapat tiga pendekatan dalam pembuatan keputusan etika yang diuraikan oleh Kidder dalam memutuskan etika berdasarkan pada tradisi falsafah moral. Setiap pendekatan dapat digunakan untuk memecahkan masalah namun semuanya memiliki kelemahan dan jebakannya sendiri. Pertama, pendekatan *Utilitarianisme* yaitu suatu tindakan dikatakan benar atau salah dilihat dari sejauh apakah tindakan tersebut menimbulkan kegunaan dan kebahagiaan bagi orang banyak. Dengan kata lain, tindakan ini dikatakan benar atau salah dilihat dari konsekuensinya. Pemikiran tersebut beranjak dari pemikiran Jeremy Bentham, moralitas suatu tindakan ditentukan oleh pertimbangan apakah tindakan tersebut bisa menghasilkan kegunaan atau kegunaan bagi masyarakat banyak (Samsuri and Luwarso 2007). Pemikiran tersebut kemudian dirumuskan dalam "*the great happiness for the great number*". Hal ini kemudian dipahami secara bersamaan dengan John Stuart Mill yang mengungkapkan pikirannya tidak jauh berbeda dengan prinsip tersebut, namun ia mengkritik Bentham. Menurutnya, moralitas tindakan bukan hanya ditentukan secara kuantitas melainkan kualitas.

Bentham menunjukkan bahwa hasil dari perhitungan sisi negatif dan positif, apabila menghasilkan selisih positif maka tindakan tersebut dikatakan benar, sebaliknya jika menghasilkan selisih yang negatif maka tindakan tersebut tidak menghasilkan utilitas (Mill 2003). Berbeda dengan Bentham, Mill menekankan pada kualitas kebahagiaan yang dihasilkan dari suatu tindakan. Menurut teori utilitarianisme Mill, suatu tindakan dikatakan benar apabila menghasilkan manfaat dan mendatangkan kebahagiaan yang berkualitas dan menjauhkan seseorang dari

keburukan. Dengan demikian, tindakan yang menghasilkan keburukan dan penderitaan bagi banyak orang merupakan yang tidak benar (Mill 2003).

Kedua, keputusan berdasar peraturan: *Imperatif Kategoris Kant*. Istilah tersebut dikenalkan oleh Emmanuel Kant. Pendekatan tersebut merupakan sebuah pendekatan yang relatif sederhana terhadap alasan moral, apapun yang telah diputuskan dapat diyakini sebagai keputusan yang bersifat moral atau etis jika prinsip tersebut menjadi dasar keputusan dalam hukum universal (Institute Center of Journalist 2006). Dengan kata lain, keputusan yang dibuat berlaku bagi siapa saja di dunia ini dalam situasi yang sama.

Istilah lain untuk menggambarkan pendekatan Kant adalah etika deontologikal, yakni etika yang tidak berdasarkan pada konsekuensi tetapi pada *deon*, dalam bahasa Yunani yang berarti tugas. Dalam etika deontologi, tindakan atau pilihan-pilihan moral didasarkan pada prinsip-prinsip menurut kewajiban moral universal tanpa menganggap apakah konsekuensi atas pilihan atau tindakan tersebut baik atau buruk (Keraf 1998).

Ketiga, Aturan Emas atau Keterbalikan. Prinsip dasar dari pendekatan ini merupakan aturan dari tindakan seseorang yang melakukan sesuatu terhadap orang lain sebagaimana orang lain memperlakukan seseorang (Institute Center of Journalist 2006). Aturan tersebut menempatkan seseorang pada kedudukan orang lain, sehingga terjadi pertukaran pesan. Aturan emas ini juga sering disebut sebagai pendekatan berdasarkan kepedulian. Aspek tersulit dari pendekatan ini adalah menentukan diri dan menentukan siapa yang menjadi orang lain. Dengan

menempatkan diri sebagai orang lain, maka seorang jurnalis mampu melihat masalah dari berbagai sudut pandang. Begitu sudah menjajagi berbagai sudut pandang, seorang jurnalis dapat memutuskan tindakan yang bisa dianggap sebagai rasa kepedulian tertinggi.

Menurut Kidder, pendekatan berdasarkan kepedulian akan menimbang bobot nilai kemanusiaan dari setiap sudut pandang (Institute Center of Journalist 2006). Jika suatu berita dapat memberi manfaat penting bagi seluruh masyarakat dan semua orang bisa membayangkan menjadi peran dalam peristiwa yang terjadi dan menghargai berita tersebut maka penganut etika aturan emas akan menerbitkan berita tersebut sebagai upaya untuk memberikan pembelajaran dan menciptakan kepedulian terhadap sesama.

1.5.5 Nasionalisme

Berbicara mengenai ke-Indonesiaan akan terkait erat dengan yang sebuah konsep yang bernama nasionalisme. Nasionalisme dalam arti umum memiliki definisi suatu paham mengenai nation/bangsa yang dimiliki oleh penduduk/masyarakat di suatu negara. Sementara itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata nasionalisme memiliki arti paham (ajaran) untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. Arti lainnya adalah kesadaran keanggotaan di suatu bangsa yg secara potensial atau aktual bersama-sama mencapai, mempertahankan, dan mengabadikan identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan bangsa itu; semangat kebangsaan.

Menurut Ernest Gellner (1983) dalam bukunya yang berjudul "*Nations and Nationalism*", "*Nationalisme is primarily political principle, which holds the*

political and the national unit should be congruent, it is a theory of political legitimacy” (Gellner 2006)

Terjemahan bebasnya adalah, nasionalisme adalah suatu prinsip politik yang paling utama, yang menyatukan aspek politik dan semua aspek di sebuah nation/negara yang seharusnya bisa berjalan beriringan, dan nasionalisme merupakan teori mengenai kekuasaan politik atau Negara. di dalam bukunya *Nation and Nationalism* Gellner menyetujui konsep Negara dari Webber dimana menurut Webber Negara merupakan sebuah lembaga atau organisasi dalam masyarakat yang memiliki kewenangan besar untuk melakukan tindak kekerasan terhadap warga negaranya. Gellner juga menekankan bahwa sebuah negara akan *exist* saat ada kelompok pekerja di situ sehingga bisa memberikan kesempatan kepada negara untuk melakukan penegakkan peraturan kepada kelas pekerja tersebut.

Gellner juga menyebutkan bahwa sebenarnya dalam sebuah Negara, masyarakat atau warga negaranya tidak mampu menjelaskan secara konseptual mengenai pengalaman mereka tentang apa yang dinamakan dengan nasionalisme. Karena menurut Gellner konsep tentang nasionalisme itu akan bisa terjadi saat sudah ada konsep mengenai negara, yang pada akhirnya elemen-elemen negara-lah yang membentuk secara konseptual apa itu nasionalisme.

Konsep nation/bangsa jauh lebih rumit dari kelihatannya. Memiliki bangsa tidak selamanya memiliki hubungan dengan aspek-aspek kemanusiaan, walaupun sekarang ini sudah mulai mendekati ke arah situ. Menurut Gellner, negara bisa saja muncul tanpa adanya bantuan dari suatu bangsa dan beberapa bangsa telah muncul

tanpa adanya bantuan dari negara itu sendiri. Walaupun berbeda namun kedua pendapat tersebut memiliki kesamaan bahwa keduanya memiliki 2 kebutuhan mendasar yaitu kesamaan kultur, *common sense*, dan sejenisnya, dan yang kedua adalah pengakuan dari anggota yang lainnya serta menjalankan tugas kewajiban berdasarkan fungsi-fungsinya.

Pada akhirnya Gellner mengatakan bahwa nasionalisme itu merupakan sebuah kristalisasi dari kebudayaan baru dan bukannya kebangkitan dari budaya lama, dan nasionalisme itu merupakan pengenalan terhadap budaya tinggi di dalam masyarakat yang sebelumnya dalam budaya rendah telah menjadi kehidupan mayoritas masyarakatnya.

1.5.6 Sekuritisasi

Dalam usaha menunjukkan isu keamanan yang dibalut media dengan melakukan pembingkaiian terkait dengan pemulangan eks ISIS. Penelitian ini menggunakan konsep sekuritisasi yang diadopsi dari studi keamanan. Konsep sekuritisasi dapat dilihat melalui perspektif *Copenhagen School*.

Barry Buzan (Buzan, Waever, and Wilde de 1998) dalam *Security: A New Framework for Analysis* mendefinisikan keamanan dalam konteks militeristik tradisional. Keamanan berbicara mengenai kelangsungan hidup yang berjalan ketika sebuah isu dihadirkan dan berimplikasi terhadap sikap dari ancaman untuk suatu objek khusus. Logika keamanan tersebut diaplikasikan terhadap lima sektor keamanan yakni militer, lingkungan, ekonomi, sosial dan politik. Dinamika dari masing-masing sektor keamanan diukur melalui bagaimana menjadikan aktor sebagai isu keamanan dan objek terkait. Aktor kemudian dijadikan sebagai isu

keamanan ketika mendeklarasikan suatu objek yang khusus dapat menerima ancaman. Dalam hal ini eks ISIS dianggap sebagai aktor sosial yang dapat mengancam keamanan secara keseluruhan.

Sementara itu sekuritisasi merupakan sebuah bentuk ekstrim dari upaya politik. Setiap isu publik dapat dikategorikan dalam tiga jangkauan antara lain:

1. *Nonpoliticized* yang berarti pemerintah tidak menanggapi permasalahan ini karena tidak termasuk dalam isu yang menyangkut kepentingan dan perdebatan dalam ranah publik.
2. *Politicized*, yang berarti bahwa isu tersebut telah masuk pada ranah kebijakan publik yang membutuhkan campur tangan pemerintah dalam hal alokasi sumber daya, atau kebijakan tambahan.
3. *To securitized*, yang berarti bahwa sebuah isu telah dianggap sebagai ancaman kemananan yang bersifat nyata, yang tentu saja membutuhkan tindakan yang darurat dimana penggunaan prosedur diatas prosedur politik biasa dianggap sah untuk dilakukan.

Secara tekstual sebuah isu dianggap sebagai isu keamanan apabila isu tersebut membutuhkan prioritas utama sehingga dianggap sebagai isu yang lebih penting dibandingkan isu yang lainnya dan dipandang sebagai ancaman yang nyata adanya. Akan tetapi, sebuah isu berubah menjadi isu keamanan tidak hanya disebabkan karena isu yang bersangkutan merupakan isu yang benar-benar mengancam (*existential threat*) namun lebih disebabkan karena isu tersebut dimunculkan sebagai isu yang mengancam.

Copenhagen School memandang keamanan sebagai konsep konstruksi sosial. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa masalah keamanan merupakan produk dari konstruksi. Suatu isu dapat dikatakan sebagai masalah keamanan karena adanya diskursus konten ditambah dengan adanya aktor politik yang mentransformasikannya dari suatu isu yang mendesak. Konsep sekuritisasi berkaitan dengan *the power of idea* atau dapat dikatakan sebagai upaya dalam mengkonstruksi pikiran. Jadi masalah keamanan muncul karena terdapat pengaruh konstruksi diskursif antar subyek: audiens, aktor yang mewacanakan dan audiens yang menyetujui.

Menurut *Copenhagen School* proses sekuritisasi memiliki dua tahap, yaitu :

1. Tahap Pemunculan Isu

Proses awal terjadinya penggambaran dan pemunculan isu-isu tertentu. Bagaimana aktor dapat menaikkan sebuah isu kepermukaan dan berhasil menarik perhatian banyak pihak terutama *audience*. Pada tahap pertama sekuritisasi, aktor negara atau non-negara misalnya serikat pekerja atau gerakan rakyat menggambarkan isu-isu, orang, kelompok, atau entitas tertentu sebagai ancaman eksistensial terhadap objek sasaran atau komunitas.

Isu-isu tersebut ditetapkan sebagai masalah keamanan nasional ataupun internasional karena dianggap lebih penting daripada yang lainnya. Isu tersebut bahkan dapat didramatisasi dan dipresentasikan untuk menjadi 'prioritas tertinggi' agar memungkinkan pelaku sekuritisasi dapat mendahulukannya sebelum hal-hal lain. Dengan demikian, menjadi jelas bahwa proses sekuritisasi disini dibangun

secara sosial, karena sebuah isu diubah menjadi agenda keamanan dengan hanya membingkainya sebagai ancaman, bukan hanya karena adanya ancaman eksistensial nyata. Di sisi lain, *Copenhagen School* juga memandang sekuritisasi sebagai "*intersubjective practice*" dari aktor sekuritisasi yang bertindak terhadap *audience* yang signifikan.

2. Tahap meyakinkan *audience*

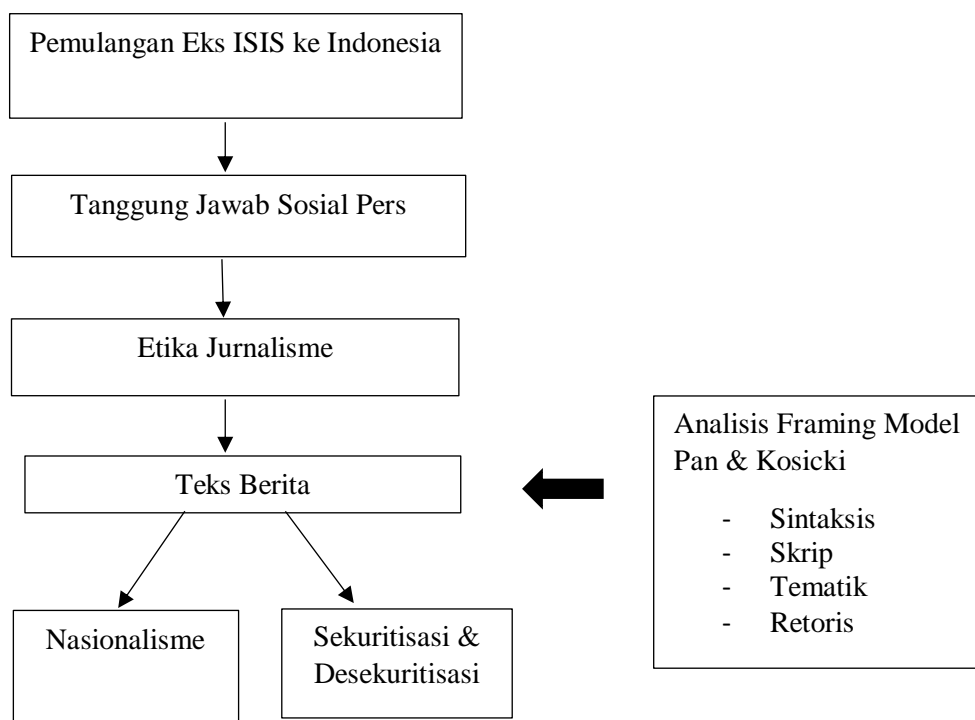
Tahap kedua yang lebih penting adalah menyangkut keberhasilan sekuritisasi yang bergantung pada berhasil atau tidaknya *audience* diyakinkan untuk menerima bahwa sebuah objek rujukan tertentu memang terancam secara eksistensial. Dalam konsep pertama Wæver, keamanan disamakan dengan sebuah pidato, sementara sekuritisasi mengacu pada bagaimana sebuah isu digambarkan secara linguistik sebagai ancaman eksistensial. Didalam konsep ini *Copenhagen School* juga memberi penekanan lebih pada peran *audience* untuk mengakui adanya ancaman dan dengan demikian mendukung suatu *speech act*. Meskipun aktor non-negara berangsur-angsur menjadi lebih penting dalam model sekuritisasi, proses seperti itu tampaknya tetap didominasi oleh aktor yang berpengaruh di posisi atas yang kebanyakan diisi oleh pemerintah suatu Negara.

Selain konsep sekuritisasi, terdapat konsep pengertian desekuritisasi, yang merupakan kebalikan dari konsep sekuritisasi. Yaitu proses dimana aktor-aktor menjauhkan isu tertentu dari ranah keamanan dan kembali memasuki ranah politik yang normal. Desekuritisasi juga memiliki tahap yang sama dalam pembentukan isu. Begitu isu tertentu disekuritisasi, isu tersebut tidak akan ditangani dengan logika keamanan dan dinyatakan sebagai ancaman. Desekuritisasi dapat dilakukan

dengan tidak membicarakan suatu isu tersebut agar tidak tersekritisasi, dan memindahkan isu tersebut kembali ke politik normal.

Dalam penelitian ini, sekritisasi dan desekritisasi dapat dilihat dari peran media sebagai medium *speech act* pada tahap meyakinkan *audience*, yang membingkai pemulangan eks ISIS ke Indonesia sebagai sebuah bentuk ancaman keamanan dan sebaliknya. Media merupakan bagian yang paling terpenting dalam memberikan pemahaman terkait dengan isu yang dapat mengancam stabilitas keamanan dan memberikan respon yang cukup kuat kepada publik tentang sebuah isu apakah isu tersebut dapat mengancam keamanan secara langsung atau tidak.

1.5.7. Kerangka Pemikiran



Gambar 1.2
Kerangka Pemikiran Penelitian

1.6 Operasional Konsep

1.6.1 Nasionalisme

Ernest Gellner (1983) menyetujui konsep Negara dari Webber dimana menurut Webber Negara merupakan sebuah lembaga atau organisasi dalam masyarakat yang memiliki kewenangan besar untuk melakukan tindak kekerasan terhadap warga negaranya. Konsep tersebut dapat dijelaskan melalui berbagai kebijakan atau keputusan pemerintah yang berdampak pada tatanan sosial masyarakat. Dalam pemingkain pemulangan eks ISIS ke Indonesia, pemerintah telah memberikan keputusan secara resmi untuk menolak kepulangan mereka, karena mereka dianggap sebagai penghianat negara. Kasus ini memberikan gambaran bahwa tolak ukur dari nasionalisme bangsa dilihat secara simbolik yang memunculkan kesadaran nasional. Sehingga, perdebatan mengenai pemulangan eks ISIS yang ditampilkan oleh media banyak melihat dari sisi nasionalisme sebagai bahan pertimbangan untuk memulangkan eks ISIS atau menolaknya kembali ke Indonesia.

1.6.2 Sekuritisasi dan Desekuritisasi

Salah satu tahapan dari sekuritisasi dan desekuritisasi menurut *Copenhagen School* adalah *speech acts* yang merupakan proses dalam mengembangkan isu yang dianggap mengancam keamanan. *Speech acts* digunakan oleh para pemegang kebijakan untuk memberikan pemahaman kepada publik tentang bagaimana suatu keadaan dapat mengancam keamanan atau sebaliknya. Media menjadi bagian terpenting dalam mengembangkan isu tersebut.

Dalam pembingkaiian pemulangan eks ISIS ke Indonesia, beberapa media memberikan ruang kepada aktor yang melakukan sekuritisasi dan desekuritisasi, bahkan media sendiri ikut membingkai keadaan tersebut. Sekuritisasi memunculkan isu yang dibalut sebagai isu kemanan yang memberikan anggapan bahwa semua eks ISIS sangat berbahaya jika dipulangkan, karena dapat membangkitkan virus teroris baru yang dapat mengancam stabilitas keamanan negara. Sementara desekuritisasi melakukan sebaliknya. Media tidak memunculkan eks ISIS sebagai isu keamanan namun sebagai isu sosial yang harus mendapatkan perhatian banyak pihak, bukan saja soal memulangkan atau menolak tetapi bagaimana menanggapi para eks ISIS asal Indonesia yang menjadi pengungsi atau tahanan di Suriah.

Proses *speech acts* dalam sekuritisasi yang dilakukan oleh media dapat dilihat dalam kasus serangan teroris pada 11 September 2002 atau 9/11 di Amerika Serikat. Media menempatkan aktor politik sebagai narasumber utama dalam berbagai berita. Media bahkan menempatkan kelompok atau komunitas muslim Amerika Serikat sebagai kelompok yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Hal ini dilakukan karena kelompok Al-Qaeda merupakan kelompok ekstrimis Islam sebagai kelompok yang dianggap bertanggung jawab atas serangan tersebut. Dalam peristiwa 9/11, diprediksi telah menewaskan lebih dari 3.000 jiwa yang berasal dari 85 negara. Sehingga, dampak yang terjadi munculnya islamopobhia dan diskriminasi bagi kelompok muslim di negara tersebut.

Sedangkan proses desekuritisasi dapat dilihat dari media yang menganggap isu-isu keamanan tidak dianggap sebagai sebuah ancaman. Seperti pada

pemberitaan pengungsi Rohingya oleh media-media Indonesia yang cenderung memberitakan mereka bukan sebagai kelompok yang mengancam keamanan. Sementara negara-negara lain seperti Turki, Bangladesh dan beberapa negara di Eropa menganggapnya sebagai ancaman. Hal ini terjadi karena keberadaan pengungsi rohingya dianggap sebagai kelompok yang rentan dan harus mendapatkan pertolongan. Sehingga pemahaman publik terkait dengan isu Rohingya mengarah pada solidaritas untuk membantu mereka melawan krisis kemanusiaan. Melalui contoh kasus tersebut, peran media dalam membingkai suatu berita memberikan efek yang cukup signifikan bagi publik karena media dianggap sebagai corong informasi utama yang menjadi pedoman masyarakat.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Tipe dan Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang dianggap cocok untuk memahami secara mendalam masalah sosial dan kemasyarakatan (Cresswell 2012). Metode kualitatif bertujuan untuk mengungkap berbagai fenomena dan keunikan yang terdapat dalam individu, kelompok, masyarakat, dan organisasi dalam kehidupan sehari-hari secara menyeluruh, rinci, dalam, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. (Mulyana 2018)

Menurut Strauss dan Corbin (Basrowi and Sukidin 2002) penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara kuantifikasi lainnya. Dalam penelitian kualitatif, penginterpretasian hasil penelitian tidak menggunakan data numerik dengan tujuan menemukan maksud dan pola

suatu hubungan (Basrowi and Sukidin 2002). Pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan suatu uraian mendalam tentang ucapan, tulisan, atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat atau suatu organisasi tertentu dalam suatu *setting* konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan holistik.

Melalui metode penelitian kualitatif diharapkan didapatkan pemahaman tentang kenyataan melalui proses induktif, oleh karenanya peneliti diharapkan selalu memusatkan perhatian pada kenyataan atau kejadian dalam konteks yang diteliti. Peneliti kualitatif memasuki area penelitian yang diminatinya untuk menafsirkan fenomena yang ditemuinya, tidak memanipulasi atau mengontrolnya, dan berusaha mencampurinya sedikit mungkin. Peneliti kualitatif menekankan logika individu-individu yang diteliti, daripada logika formal. Dengan pola pikir induktif, peneliti menarik hal-hal khusus yang ia temui dalam setiap kejadian di mana ia sedang melakukan pengamatan ke dalam kesimpulan secara umum yang merujuk pada pola perilaku atau asumsi dari kejadian atau tindakan sosial yang dilakukan oleh subjek penelitian tersebut.

Dalam penelitian kualitatif, teori bukanlah segala-galanya, melainkan sebuah kisi-kisi, kerangka yang longgar, ketimbang sebagai alat untuk menjaring, mengukur atau bahkan menaklukan data. Oleh karena itu, penelitian kualitatif jarang keluar dari medan penelitiannya dengan hipotesis ketat yang kebenarannya akan diuji. Dengan kata lain, penelitian kualitatif lebih menekankan poses dan makna ketimbang kuantitas, frekuensi atau intensitas (yang secara matematis dapat diukur), meskipun peneliti tidak mengharamkan statistik deskriptif dalam bentuk

distribusi frekuensi atau persentase untuk melengkapi analisis datanya. (Mulyana 2018)

1.7.2 Analisis Framing Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki

Dalam perspektif komunikasi, metode analisis framing digunakan untuk membedah cara-cara atau ideologi media saat mengkonstruksi realita. Metode ini berupaya mencermati strategi seleksi, penonjolan, dan pertautan fakta ke dalam berita agar menjadi lebih bermakna, lebih menarik, lebih berarti, dan lebih diingat dalam rangka menggiring interpretasi khalayak sesuai perspektif yang ingin dibangun. Secara lebih sederhana, (Eriyanto 2011) menggambarkan analisis *framing* sebagai metode untuk mengetahui bagaimana realitas dibingkai oleh media. Pembingkaiian tersebut dilakukan melalui proses konstruksi, artinya realitas sosial dimaknai dan dikonstruksi menurut makna tertentu.

Terdapat beberapa model analisis framing yang banyak digunakan. Pada penelitian ini, peneliti memilih menggunakan analisis framing milik Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. Model ini berasumsi bahwa setiap berita mempunyai frame yang berfungsi sebagai pusat dari organisasi ide (Eriyanto 2011). Dalam pendekatan ini, perangkat framing dibagi kedalam empat struktur besar, yaitu : sintaksis, skrip, tematik dan retorik.

1. Sintaksis

Sintaksis merupakan susunan kata atau frase dalam kalimat. Dalam wacana berita sintaksis menunjuk pada pengertian susunan dan bagian berita – *headline*, *lead*, *latar informasi*, *sumber*, *penutup* - dalam satu kesatuan teks berita secara keseluruhan. Elemen sintaksis memberi petunjuk yang berguna tentang

bagaimana wartawan memaknai peristiwa dan hendak kemana berita tersebut akan dibawa (Eriyanto 2011).

2. Skrip

Skrip adalah salah satu strategi wartawan dalam mengkonstruksikan berita. Bentuk umum dari struktur skrip adalah pola 5W+1H yaitu : *who, what, where, when, how dan why* yang digunakan oleh wartawan dalam menyusun berita. melalui skrip, wartawan dapat memberikan tekanan mana yang didahulukan dan bagian mana yang dijadikan sebagai strategi untuk menyembunyikan informasi penting. Upaya penyembunyian tersebut dilakukan dengan menempatkan di bagian akhir agar terkesan kurang menonjol (Eriyanto 2011).

3. Tematik

Bagi pan dan Kosicki, berita sangat mirip dengan pengujian hipotesis: peristiwa yang diliput, sumber yang dikutip dan pernyataan yang diungkapkan digunakan untuk mendukung secara logis hipotesis yang dibuat (Eriyanto 2011). Tema yang dihadirkan atau ditunjukkan secara tidak langsung digunakan untuk mendukung hipotesis yang sudah disusun. Dalam menulis berita menurut Eriyanto (2011), seorang wartawan memiliki tema tertentu atas suatu peristiwa. Ada beberapa elemen yang diamati dalam perangkat tematik yaitu: koherensi peralihan atau jalinan antarkata, proposisi atau kalimat. Koherensi juga memiliki berbagai macam bentuk yaitu: *pertama*, koherensi sebab-akibat, *kedua*, koherensi penjelas dan *ketiga*, koherensi pembeda.

4. Retoris

Struktur retorik dari berita menggambarkan pilihan gaya atau kalimat yang dipilih oleh wartawan untuk menekankan arti yang ditonjolkan dalam sebuah teks. Retorik digunakan untuk membuat citra, meningkatkan kemenonjolan pada sisi tertentu dan meningkatkan gambaran yang diinginkan dari suatu berita (Eriyanto 2011). Terdapat beberapa elemen struktur retorik yang digunakan oleh wartawan. Pertama, lesikon, pemilihan dan pemakaian kata untuk menandai atau menggambarkan peristiwa. Kedua, unsur grafis untuk bagian yang ingin ditonjolkan dan menekankan kepada khalayak pentingnya bagian tersebut. Ketiga, elemen grafis yang muncul dapat berupa bentuk foto, gambar dan tabel untuk mendukung gagasan atau bagian lain yang ingin ditonjolkan (Eriyanto 2011).

Tabel 1.1

STRUKTUR	PERANGKAT FRAMING	UNIT YANG DIAMATI
SINTAKSIS Cara wartawan menyusun fakta	1. Skema Berita	<i>Headline, lead</i> , latar belakang, kutipan, sumber, pernyataan, penutup
SKRIP Cara wartawan mengisahkan fakta	1 Kelengkapan berita	5W+1H
TEMANTIK Cara wartawan menulis fakta	3. Detail 4. Koherensi 5. Bentuk Kalimat 6. Kata Ganti	Paragraf, proposisi, kalimat, hubungan antar kalimat

RETORIS	7. Leksikon	Kata, idiom, gambar/foto, grafik
Cara wartawan menekankan fakta	8. Grafis	
	9. Metafora	

Sumber : Eriyanto (2011)
Analisis Framing Konstruksi, Ideologi dan Politik Media

1.7.3 Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini yaitu teks artikel berita yang yang ditayangkan oleh surat kabar harian *Harian Kompas* dan *Koran Tempo* pada tanggal 10 Februari – 23 Februari 2020 yang membingkai pemulangan eks ISIS ke Indonesia ditengah suasana pengambilan keputusan resmi dari pemerintah untuk menolak atau memulangkan eks ISIS ke Indonesia.

1.7.4 Sumber Data

- **Data Primer**

Data primer terdiri dari berita yang dimuat dalam surat kabar harian koran Kompas dan Koran Tempo yang terkait dengan pemberitaan mengenai pemulangan eks ISIS ke Indonesia dalam rentan waktu 10 Februari – 23 Februari 2020.

- **Data Sekunder**

Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka, yaitu berupa kegiatan pengumpulan bahan-bahan acuan yang relevan dengan penelitian ini seperti buku, jurnal, artikel, dokumen, dan tesis yang berkaitan dengan penelitian ini. Hal tersebut dimaksudkan untuk mendukung dalam proses analisis data.

1.7.5 Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini data primer diambil dari dua surat kabar nasional koran *Kompas* dan *Koran Tempo*. Kedua media tersebut dipilih karena dari pengamatan awal yang dilakukan oleh peneliti ditemukan jurang sudut pandang yang berbeda sejak wacana tersebut bergulir pada Juni 2019 hingga wacana tersebut muncul kembali dan mendapat perhatian yang serius dari pemerintah.

Sebagai gambaran awal pengamatan dilakukan pada periode waktu 10 Februari – 23 Februari 2020, masa dimana masyarakat menunggu keputusan resmi pemerintah untuk menolak atau memulangkan eks ISIS ke Indonesia. Hasil pengamatan peneliti pada periode tersebut, Kompas memuat 15 berita yang bernada penolakan untuk memulangkan eks ISIS, sementara Koran Tempo memuat 8 berita yang bernada sebaliknya, yaitu melihat perspektif lain untuk memulangkan eks ISIS. Sebagai unit analisis, nantinya akan diambil 8 buah berita dari masing-masing media yang memiliki jurang sudut pandang pemberitaan yang paling lebar.

1.7.6 Analisis dan Interpretasi Data

Menurut Creswell (Cresswell 2012), analisis data merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan refleksi terus-menerus terhadap data, mengajukan pertanyaan-pertanyaan analitis, dan menulis catatan singkat sepanjang penelitian. Analisis data kualitatif dapat melibatkan proses pengumpulan data interpretasi, dan pelaporan hasil secara serentak dan bersama-sama.

Metode analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini mengikuti langkah-langkah yang dikemukakan Creswell, yaitu:

1. Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis.

Dalam tahap ini dilakukan proses mendokumentasikan data yang telah diperoleh, untuk kemudian memilah dan menyusun data tersebut ke dalam berbagai kategori yang berbeda tergantung pada sumber informasi.

2. Membaca keseluruhan data.

Dalam tahap ini dilakukan pembangunan *general sense* atas informasi yang diperoleh dan kemudian menulis gagasan umum tentang data yang diperoleh.

3. Menganalisis lebih detail dengan melakukan proses *coding* data. *Coding* merupakan proses pengolahan materi atau informasi menjadi segmen tulisan sebelum dipergunakan (Rossman & Rallis, 1998)

4. Menunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema ini akan disajikan kembali dalam narasi dan laporan kualitatif.

5. Menginterpretasi atau memaknai data.

Secara praktis, operasionalisasi pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah – langkah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data yang akan menjadi unit analisis, berupa pemberitaan terkait pemulangan eks ISIS ke Indonesia pada surat harian *Kompas* dan *Koran Tempo*
2. Menganalisis data menggunakan model analisis *framing* Pan & Kosicki, dengan kerangka sebagai berikut:
 - a. Menganalisis struktur Sintaksis (cara wartawan melakukan

penyusunan fakta) dengan memperhatikan skema berita melalui pengamatan *headline*, *lead*, latar belakang, kutipan, sumber, pernyataan, penutup dari berita yang menjadi unit analisis.

- b. Menganalisis struktur Skrip (cara wartawan melakukan pengkisahan fakta) dengan memperhatikan kelengkapan berita melalui pengamatan kelengkapan 5 W + 1 H dari berita yang menjadi unit analisis.
 - c. Menganalisis struktur Temantik (cara wartawan melakukan penulisan fakta) dengan memperhatikan detail, koherensi, bentuk kalimat dan kata ganti melalui pengamatan paragraf, proposisi, kalimat serta hubungan antar kalimat dari berita yang menjadi unit analisis.
 - d. Menganalisis struktur Retoris (cara wartawan menekankan fakta) dengan memperhatikan leksikon, grafis dan metafora melalui pengamatan kata, idiom, gambar, foto serta grafik dari berita yang menjadi unit analisis.
3. Melakukan pengolahan hasil analisis yang berasal dari masing masing media untuk kemudian dilakukan perbandingan antara kedua media tersebut.
 4. Menarik kesimpulan hasil penelitian.
 5. Memberikan rekomendasi berdasarkan hasil penelitian.

1.7.7 Kualitas Data

Guba dan Lincoln mengatakan *goodness* atau kriteria kualitas penelitian ini dapat dicermati dari paradigma atau perspektif yang digunakan oleh peneliti. *Goodness* dalam studi ini didasarkan pada sejauh mana penelitian memperhatikan konteks historis, sosial, budaya, ekonomi dan politik (*historical situatedness*) (Denzin, N.K., Lincoln 2009). Dalam penelitian ini metode analisis framing Pan & Kosicki merupakan metode yang sesuai untuk mendeskripsikan makna dari pembingkaiian pemulangan eks ISIS ke Indonesia. Terlebih *analisis framing* dapat membuktikan narasi dalam sebuah media berdasarkan dengan pengalaman (dalam konteks sejarah, sosial, budaya, ekonomi politik) pada pembentukan pada teks-teks berita yang ditampilkan kepada masyarakat.

1.7.8 Keterbatasan Penelitian

Penelitian kali ini, terbatas pada analisis *framing* terhadap teks berita. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis framing Zhongdang Pan & Herald Kosicki yang membongkar strategi penulisan berita tanpa melihat sudut pandang, referensi dan pengalaman masing-masing khalayak. Selain itu, penelitian ini hanya melibatkan dua surat kabar (Harian Kompas dan Koran Tempo) sebagai objek penelitian. Sampel penelitian juga terbatas pada 8 buah berita dari masing – masing media massa yang dimuat pada rentang periode waktu yang cukup singkat (10 Februari – 23 Februari 2020). Keterbatasan di atas tidak terlepas dari pendeknya waktu penelitian ini. Tentunya penelitian dengan waktu yang lebih panjang akan meminimalisir keterbatasan tersebut dan diharapkan akan mampu mendapat hasil yang lebih komprehensif.